



Kemendikdasmen
BPMP Provinsi Riau



LAPORAN KINERJA (LAKIN) BPMP PROVINSI RIAU 2025



2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH

**PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya BPMP Provinsi Riau berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja BPMP Provinsi Riau ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPMP Provinsi Riau mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Di dalam Laporan Kinerja BPMP Provinsi Riau tersaji informasi mengenai capaian kinerja, analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja BPMP Provinsi Riau. Harapan kami, Laporan Kinerja BPMP Provinsi Riau dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja organisasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan layanan dan kinerja di tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja BPMP Provinsi Riau bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pekanbaru, Januari 2026

Kepala BPMP Provinsi Riau



Dr. Nilam Suri

Ikhtisar Eksekutif

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola organisasi dan percepatan pencapaian tujuan BPMP Provinsi Riau. Perumusan tujuan BPMP Provinsi Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah mengacu kepada tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi - misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Riau merupakan turunan dari Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut : Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPMP Provinsi Riau periode 2025-2029 adalah Pertama, penguatan mutu layanan pendidikan pada jenjang PAUD, dasar, menengah, pendidikan khusus, dan layanan khusus. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui meningkatnya kualitas lingkungan belajar PAUD, persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum nasional pada literasi membaca dan numerasi, serta semakin banyaknya satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, dan inklusivitas–kebhinekaan pada kategori baik.

Kedua, penguatan tata kelola BPMP Provinsi Riau yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Capaian tujuan ini diukur melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian. Melalui perumusan tujuan ini, BPMP Provinsi Riau berupaya memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dikelola dapat memberikan hasil (outcome) yang optimal, selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan. Dimana tujuan BPMP Provinsi Riau adalah memperkuat mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah di Provinsi Riau.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui meningkatnya kualitas lingkungan belajar PAUD, persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum nasional pada literasi membaca dan numerasi, serta semakin banyaknya satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, dan inklusivitas–kebhinekaan pada kategori baik.

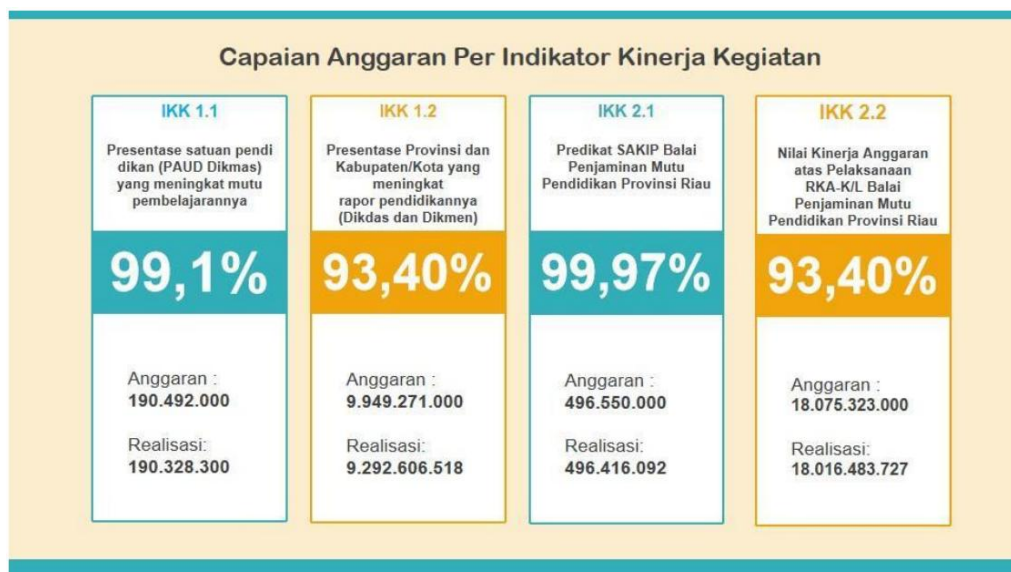
Keberhasilan pelaksanaan program juga ditunjukkan oleh capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik serta perolehan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal A.

Pada Tahun 2025, BPMP Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan secara terarah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian indikator tujuan strategis secara umum menunjukkan hasil yang baik, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan kinerja satker dalam mendukung sasaran strategis Ditjen PAUD Dikdasmen.

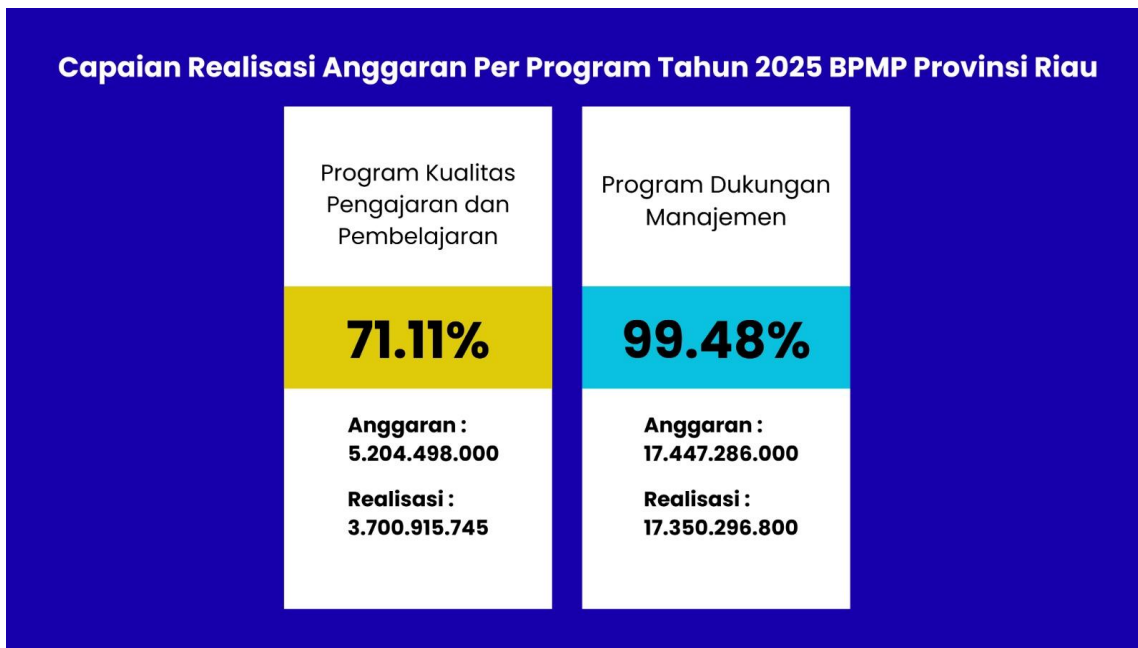
Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan berbasis kinerja yang semakin berkualitas, pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, satker telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja. Capaian Tahun 2025 menjadi landasan bagi peningkatan kinerja BPMP Provinsi Riau pada tahun berikutnya

Tujuan strategis BPMP Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban yakni, Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah di Provinsi Riau. Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan, yaitu Meningkatnya Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen, dan Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau. Adapun ketercapaiannya sampai tahun 2025 telah mencapai 100 %

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Dari total 4 Indikator Kinerja, sebanyak 100% berhasil mencapai target pada IKK 2.1 dan 2.2, sedangkan pada IKK 1.1 dan 1.2 melampaui target capaian. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Tingkat ketercapaian kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Berikut ringkasan capaian kinerja BPMP Provinsi Riau pada tahun 2025:



Gambar 1.1 Capaian realisasi anggaran per indikator kinerja kegiatan tahun 2024



Gambar 1.2 Capaian realisasi anggaran per indikator kinerja kegiatan tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2025 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target/sasaran program BPMP Provinsi Riau.

Selama tahun 2025 terdapat kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Blokir anggaran sesuai Inpres No.1/2025
2. Dana Operasional Perkantoran dan Dukungan Manajemen mengalami efisiensi sesuai Inpres no.1/2025
3. Penentuan metode pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi geografis Provinsi Riau
4. Sulitnya mencari lokasi kegiatan yang memadai dengan berbagai sumber daya yang diperlukan di daerah
5. Perbedaan kesiapan satuan pendidikan dalam memahami mekanisme dan teknis pelaksanaan

TKA

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang ada, antara lain:

1. Pengusulan pembukaan blokir anggaran ke Eselon 1
2. Melakukan efisiensi terhadap keperluan belanja operasional kantor dan menjadwalkan ulang kegiatan yang berhubungan dengan dukungan manajemen
3. Beberapa Kegiatan dilakukan secara daring untuk memperluas cakupan audien dan berkoordinasi dengan dinas untuk pembiayaan bersama dalam pelaksanaan program
4. Berkoordinasi dengan dinas Kabupaten/Kota untuk tempat kegiatan yang memadai
5. Telah dilakukan advokasi, dan pendampingan, serta penyusunan panduan teknis ringkas beserta contoh dokumen sebagai acuan bersama, serta pemetaan tingkat kesiapan satuan pendidikan

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Secara umum, kondisi BPMP Provinsi Riau pada tahun 2025 menunjukkan kesiapan kelembagaan, efektivitas koordinasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya yang mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang lebih berkualitas. Hal ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Struktur organisasi BPMP Provinsi Riau terdiri dari unsur pimpinan, unit teknis, serta bagian-bagian pendukung yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional serta pejabat pelaksana, yang berfungsi memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh unsur bekerja secara sinergis dalam rangka mencapai sasaran strategis Renstra 2025–2029, khususnya terkait peningkatan mutu layanan pendidikan, efektivitas tata kelola, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2025, terdiri dari aparatur dengan kompetensi beragam, baik fungsional maupun struktural. Upaya peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta penerapan manajemen kinerja berbasis hasil. Budaya kerja berintegritas, adaptif, dan kolaboratif terus ditumbuhkan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Tematik dan penguatan nilai ASN BerAKHLAK.

BPMP Provinsi Riau merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Ditjen PAUD Dikdasmen. BPMP Provinsi Riau pertama kali dibentuk tahun 2022 sesuai dengan Permendikbudristek No. 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Sejak 25 Desember 2023, BPMP Provinsi Riau dipimpin oleh Dr. Nilam Suri. Jumlah SDM sebanyak 71 orang PNS, 29 orang PPPK, dan 6 orang Tenaga Alih Daya. BPMP Provinsi Riau mempunyai wilayah kerja 1 Provinsi Riau dan 12 Kabupaten / Kota Se- Provinsi Riau.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja BPMP Provinsi Riau Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan ini meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPMP Provinsi Riau;

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Kemendikdasmen
BPMP Provinsi Riau

TUGAS BPMP RIAU

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di tingkat provinsi.

FUNGSI BPMP RIAU

- **Melakukan pemetaan mutu pendidikan:** Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi mutu pendidikan di provinsi sesuai jenjangnya.
- **Mengembangkan model penjaminan dan peningkatan mutu:** Merancang strategi dan model untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
- **Melaksanakan supervisi penjaminan mutu:** Mengawasi implementasi dan pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan di provinsi.
- **Memberikan fasilitasi peningkatan mutu:** Membantu dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk penguatan kompetensi guru dan pengembangan pembelajaran berbasis teknologi.
- **Mengembangkan dan melaksanakan kemitraan:** Membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.
- **Melakukan pemantauan dan evaluasi:** Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- **Mengurus administrasi:** Menangani urusan administrasi terkait tugas dan fungsinya.

bmpriau.kemendikdasmen.go.id | BPMP Riau | BPMP_Riau | bmpriau | BPMP Provinsi Riau

BerAKHLAK | #PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA | RAMAH

Struktur Organisasi

BPMP PROVINSI RIAU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI RIAU

Kepala BPMP Provinsi Riau
Dr. Nilam Suri

Kepala Sub Bagian Umum
Dr. Yusra Afdal Kahar, S.Kom., M. Kom.

Kelompok Jabatan Fungsional BPMP Provinsi Riau

bmpriau.kemendikdasmen.go.id | BPMP Riau | BPMP_Riau | bmpriau | BPMP Provinsi Riau

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA | RAMAH | BerAKHLAK

D. Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. Isu Strategis yang Dihadapi BPMP Provinsi Riau meliputi perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan pada semua jenjang, peningkatan penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran, baik PIP, Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan, peningkatan angka partisipasi

sekolah terutama di wilayah afirmasi, penguatan budaya kerja berlandaskan nilai ASN, dukungan sistem teknologi informasi dalam pembelajaran, serta harmonisasi perencanaan program dan anggaran dengan pemerintah daerah.

2. Peran Strategis bagi BPMP Provinsi Riau adalah Meningkatkan kemitraan dengan Pemda dan mitra lainnya dalam hal kebijakan dan penganggaran untuk kebijakan penjaminan mutu pendidikan; Menguatkan manajemen dan tata kelola lembaga melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan birokrasi reformasi; Pengembangan kompetensi pegawai sebagai sumber daya pendukung Tusi

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra), BPMP Provinsi Riau merupakan arah kebijakan dan dasar penyelenggaraan program serta kegiatan selama periode 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran program/sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan serta prioritas program yang menjadi pedoman dalam menetapkan target kinerja tahunan, termasuk target pada tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra BPMP Provinsi Riau memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh target kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 merujuk pada indikator dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BPMP Provinsi Riau, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Visi dan misi BPMP Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Kemendikdasmen
BPMP Provinsi Riau

BPMP RIAU

VISI BPMP RIAU

"Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

MISI BPMP RIAU

- Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
- Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

bpmpriau.kemendikdasmen.go.id BPMP Riau BPMP_Riau bpmpriau BPMP Provinsi Riau

BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencapai Indonesia Emas 2045

#PENDIDIKAN BERKUALITAS UNTUK SEMUA

RAMAH



Tujuan Strategis BPMP Provinsi Riau

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:



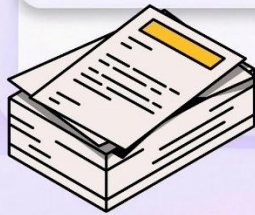
Tujuan BPMP Provinsi Riau



Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah di **Provinsi Riau**



Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah di **Provinsi Riau**



Indikator Tujuan BPMP Provinsi Riau



Persentase peserta didik satuan pendidikan formal yang mencapai **standar kompetensi minimum** dalam **asesmen kompetensi tingkat nasional**:

- Literasi Membaca
- Numerasi



1. **Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau** dengan kategori **sangat baik**
2. **Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Riau** minimal **A**



MATRIKS KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS BPMP PROVINSI RIAU



**BPMP
RIAU**

PILAR 1: MUTU LAYANAN PENDIDIKAN

TUJUAN STRATEGIS 1



Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan di Provinsi Riau.



PAUD



Menengah Dasar



Layanan Khusus



Kesetaraan

SASARAN STRATEGIS 1



Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah di Provinsi Riau.

PILAR 2: TATA KELOLA LEMBAGA

TUJUAN STRATEGIS 2



Menguatnya sistem tata kelola BPMP Provinsi Riau yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.



Partisipatif



Transparan



Akuntabel

SASARAN STRATEGIS 2



Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

VISI: PENDIDIKAN BERKUALITAS & TATA KELOLA PRIMA

B. Program Prioritas 2025-2029

BPMP Provinsi Riau dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program program Pendidikan bermutu. Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Riau, sebagai berikut:

No	Program Prioritas Kemendikdasmen / Isu Strategis	8 SNP
1	Penguatan karakter melalui implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) dan Pagi Ceria	Standar Kompetensi Lulusan
2	Penguatan pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi	Standar Penilaian
3	Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA)	
4	Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan;	Standar Isi
5	Pembelajaran Mendalam (PM)	
6	Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)	
7	Pengembangan talenta dan prestasi	Standar Proses
8	Penguatan karakter melalui pelatihan guru BK dan Ke-BK-an	
9	Peningkatan kualitas, kompetensi dan kesejahteraan guru;	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	Pemenuhan perangkat digitalisasi pembelajaran	Standar Sarana dan Prasarana
11	Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan	
12	Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berkeadilan	Standar Pengelolaan
13	Transformasi BOSP	Standar Pembiayaan

C. Rencana Kerja dan Anggaran

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BPMP PROV.RIAU TA 2025

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target 2025	Alokasi 2025
138.04.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	7605. Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran [IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	10.368	5.327.519.000
138.04.WA. Program Dukungan Manajemen	[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	7606. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik [IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Riau minimal A	3	16.846.693.000

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020, BPMP Prov.Riau menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Target PK	%
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	69,34	64,06	92,4%
2	[SK 1]	[IKK 1.2]	Persen	82,61	57,61	69,7%

	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan				
3	[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	100
4	[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik	Predikat	A	A	100

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BPMP Provinsi Riau menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Riau tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	3.92
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	84.63
[SK 2] Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	Predikat	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	Nilai	95.98

Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp9.693.421.000
2	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp16.846.693.000
Total Anggaran			Rp26.540.114.000

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BPMP Provinsi Riau disusun sebagai penyesuaian atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, seiring terjadinya perubahan pada alokasi anggaran, penyesuaian indikator, pergantian pejabat serta dinamika pelaksanaan program selama tahun berjalan.

Revisi Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Riau bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja tetap realistis, terukur, dan selaras dengan prioritas strategis kementerian serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja revisi, BPMP Provinsi Riau menegaskan kembali komitmen untuk mencapai sasaran kinerja yang telah diperbarui dan menjadikan dokumen ini sebagai dasar pengukuran capaian kinerja akhir tahun 2025.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BPMP Provinsi Riau menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Riau tahun 2025. Terdapat perubahan IKK pada SK 1 dan SK 2, yaitu sebagai berikut;

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06
	[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Riau minimal A	Predikat	A

Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp5.204.498.000
2	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp17.447.286.000
Total Anggaran			Rp22.651.784.000

Pada tahun 2025, BPMP Provinsi Riau melakukan penyesuaian pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya:

1. Perubahan nomenklatur Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen
2. Perubahan Renstra Kemdikbud menjadi Renstra Kemendikdasmen
3. Perubahan IKK 1.1 dan IKK 1.2 sesuai dengan Renstra Kemendikdasmen
4. Perubahan alokasi anggaran

Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. 26.540.114.000 menjadi Rp. 22.651.784.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban BPMP Provinsi Riau atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, BPMP Provinsi Riau melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja BPMP Provinsi Riau pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui reviu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa target mengalami deviasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi operasional di lapangan.

BPMP Provinsi Riau telah melakukan analisis terhadap capaian dan merumuskan langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Proses ini disertai penguatan integrasi perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas data kinerja, serta pengawasan intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen BPMP Provinsi Riau dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, BPMP Provinsi Riau menetapkan 2 sasaran kinerja dengan 4 indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025 :

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Diagram										
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	<p>Laporan Target vs Realisasi</p> <table border="1"> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>64.06</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>78.58</td> </tr> <tr> <td>Realisasi (%)</td> <td>122.67%</td> </tr> </table>			Kategori	Nilai	Target	64.06	Realisasi	78.58	Realisasi (%)	122.67%
	Kategori	Nilai										
Target	64.06											
Realisasi	78.58											
Realisasi (%)	122.67%											
Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	<p>Laporan Target vs Realisasi</p> <table border="1"> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>57.61</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>69.23</td> </tr> <tr> <td>Realisasi (%)</td> <td>120.17%</td> </tr> </table>			Kategori	Nilai	Target	57.61	Realisasi	69.23	Realisasi (%)	120.17%	
Kategori	Nilai											
Target	57.61											
Realisasi	69.23											
Realisasi (%)	120.17%											
Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik	Target	Capaian	%								
		Sangat Baik	Sangat Baik	100%								
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik	A	A	100%								

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode tahun 2025, BPMP Provinsi Riau menunjukkan performa yang sangat positif. Seluruh sasaran strategis berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan sebagian besar melampaui parameter yang telah ditetapkan pada IKK 1.1 dan IKK 1.2

Indikator Kinerja

1. Penjelasan definisi operasional Indikator Kinerja

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK.1	:	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK 1.1	:	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran
Definisi	:	<p>Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah akan dievaluasi mutunya secara berkala melalui asesmen. Evaluasi tersebut mencakup pengukuran kompetensi kognitif: literasi numerasi, kompetensi sosial emosional berupa profil pelajar Pancasila, serta kualitas lingkungan belajarnya. Data capaian kompetensi tersebut akan menjadi basis penyusunan profil dan rapor satuan Pendidikan. Pengukuran kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya dapat digunakan untuk informasi refleksi diri namun juga dapat memetakan kualitas antar satuan pendidikan, kualitas antar kab/kota, antar provinsi dan nasional. Agar perbandingan tersebut dapat dilakukan secara optimal tanpa bias, maka pengukuran kompetensi dilakukan secara terstandar. Standardisasi tersebut dicapai melalui penggunaan instrumen terstandar, system delivery terstandar dan pelaksanaan yang mengacu pada suatu standar operasional prosedur. Program Kemendikbudristek untuk melakukan pengukuran terstandar adalah Asesmen Nasional. Asesmen Nasional terdiri dari penilaian Asesmen Kompetensi Minimum (Literasi dan Numerasi), Survei Karakter, dan Survei lingkungan belajar.</p>

		<p>Asesmen Nasional (AN) bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan bukan mengevaluasi hasil belajar individu murid. Oleh karena itu AN diikuti oleh seluruh satuan Pendidikan jenjang dasar menengah baik pendidikan formal maupun non formal. Responden AN adalah sampel murid kelas 5, 8 dan 11, seluruh kepala satuan Pendidikan dan seluruh guru. Hasil AN tersebut dapat menggambarkan kompetensi kognitif murid, karakter murid, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas satuan Pendidikan. Diharapkan sekolah dapat melakukan perencanaan berbasis data untuk evaluasi diri dari waktu ke waktu</p>
Metode Penghitungan	:	$\frac{\text{(Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran)}}{\text{(Jumlah seluruh satuan pendidikan)}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir
Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK 1	:	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK 1.2	:	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan.
Definisi	:	<p>SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. (Permendikbud No. 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan)</p> <p>tinggi > rendah [2023 ⇔ 2024]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntas Paripurna 100 2. Tuntas Utama 90-99 3. Tuntas Madya 80-89 [0,36% ⇔ 13,41%]

		<p>4. Tuntas Pratama 70-79 [11,41% ⇨ 29,35%] 5. Tuntas Muda 60-69 [27,54% ⇨ 39,13%] 6. Belum Tuntas <60 [59,60% ⇨ 18,12%]</p> <p>perhitungan : hanya level pratama dan madya</p> <p>Formula Indeks Capaian SPM: Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima Layanan (80%)</p> <p>Nilai capaian SPM diperoleh melalui penghitungan rerata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima</p>
Metode Penghitungan	:	(Provinsi/Kab/kota yang memenuhi SPM pendidikan) / (Jumlah seluruh provinsi/kab/kota)*100%
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir

Program	:	Dukungan Manajemen
SK 2	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK 2.1	:	Persentase Satuan Kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik
Definisi	:	<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran</p>

Metode Penghitungan	:	<p>Jumlah satuan kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik</p> $= \frac{\text{Jumlah satuan kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik}}{\text{Jumlah satuan kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir

Program	:	Dukungan Manajemen
SK 2	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK 2.2	:	Persentase Satker Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A
Definisi	:	<p>Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.</p>
Metode Penghitungan	:	<p>Jumlah satuan kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Nilai SAKIP minimal A</p> $= \frac{\text{Jumlah satuan kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Nilai SAKIP minimal A}}{\text{Jumlah seluruh satuan kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen}} \times 100\%$

		Dikmen
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir

2. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

No.	NAMA KEGIATAN	IKK
1	Pendampingan Penyusunan Laporan Revitalisasi Satuan Pendidikan	1.1
2	Sosialisasi Aplikasi Usulan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026	1.1
3	Advokasi kesiapan data dan persiapan implementasi program MBG di satuan pendidikan	1.1
4	Rakor kepada pemda untuk tindak lanjut pendampingan implementasi program MBG di satuan pendidikan	1.1
5	Monitoring dan evaluasi dokumen kerangka instrumen MBG	1.1
6	Pendampingan Pelaksanaan TKA	1.1
7	Penyusunan strategi, edukasi, supervisi dan fasilitasi ke pemerintah daerah, pendamping satuan pendidikan, dan satuan pendidikan	1.1
8	Pengembangan kapasitas SDM dalam pelaksanaan PMP	1.1
9	TP-4 Advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Dukungan Kebijakan dan Regulasi Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun serta perencanaan dan penganggaran pemda	1.1
10	TP-4 Pendampingan Implementasi Program Wajar 13 Tahun dan Penanganan ATS	1.1
11	TP-4 Koordinasi dalam rangka Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS)	1.1
12	TP-4 Mengembangkan strategi penuntasan Wajib Belajar yang sesuai dengan kondisi daerah (asimetris)	1.1
13	TP-5 Internalisasi G7KAIH melalui kegiatan-kegiatan pendukung di Pusat, UPT dan daerah	1.1
14	Pengelolaan Isue dan mitigasi risiko	1.1
15	Konsolidasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah	1.1
16	Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Aplikasi E-Ijazah	1.1
17	Pembelajaran Mendalam	1.1
18	Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)	1.1
19	Semarak Hari Pendidikan Nasional	1.1
20	TP-3 Pendampingan pemda dalam pelaksanaan SPMB termasuk dalam penetapan daya tampung	1.1
21	Pemantauan Pelaksanaan MPLS di Satuan Pendidikan	1.1
22	Bimtek Program Prioritas Kemendikdasmen Bagi Pengawas Sekolah	1.1
23	TP-3 Advokasi dan Pendampingan dan pelaporan pelaksanaan SPMB	1.1
24	Menjadi mitra pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pemenuhan mutu sesuai standar nasional pendidikan, termasuk mengawal pemenuhan (SPM)	1.2
25	Pendampingan Implementasi Sistem PMP di Satuan Pendidikan	1.2
26	Pendampingan/advokasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 2026	1.2
27	Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi	1.2

3. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja IKK 1.1 dan IKK 1.2 karena partisipasi semesta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi kementerian pendidikan dasar dan menengah untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua

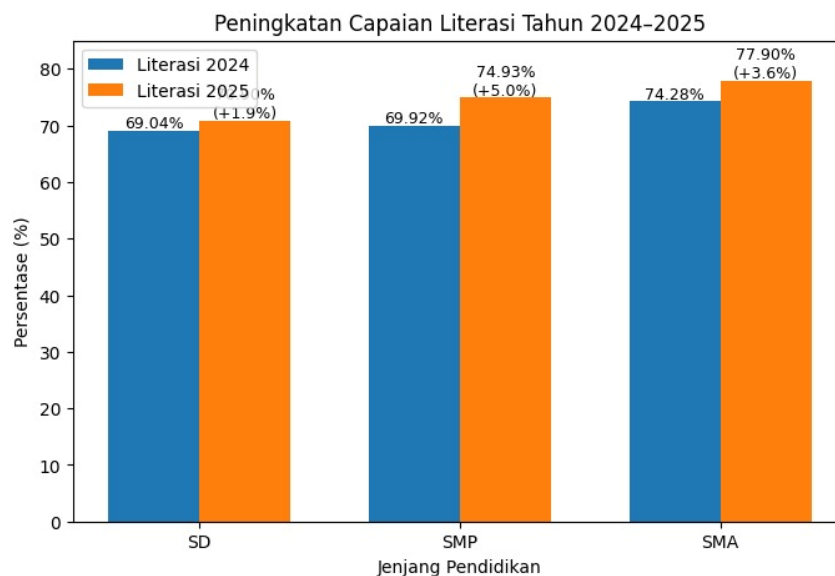
4. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025

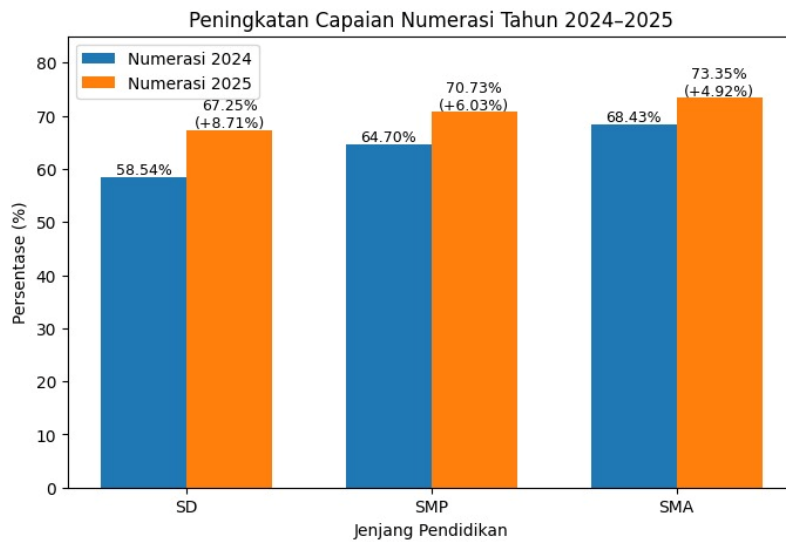
Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

- a) Keterlibatan mitra daerah yang belum optimal;
 - b) Kegiatan dilaksanakan dalam moda daring sehingga kurang optimal untuk pencapaian tujuan kegiatan;
 - c) Pokja Bunda PAUD masih belum bergerak sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan;
 - d) Peserta yang diundang pada pelaksanaan kegiatan tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan dan keterwakilan bidang yang diinginkan tidak terisi
5. Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- a) Meningkatkan peran wali wilayah untuk memastikan keterlibatan mitra
 - b) Melaksanakan kegiatan secara luring dan mengoptimalkan kegiatan kombinasi luring dan daring, dan memeriksa kembali sebelum kegiatan daring berlangsung;
 - c) Mengoptimalkan peran Bunda PAUD, dan melakukan pendampingan kepada Pokja Bunda PAUD melalui WA Grup atau komunikasi langsung;
 - d) Memastikan keterwakilan jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diminta;
6. Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- a) Mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, baik secara langsung maupun memanfaatkan WA Group;
 - b) Berupaya mengoptimalkan peran wali wilayah untuk koordinasi dan advokasi kepada Dinas Pendidikan;

Capaian literasi dan umerasi melalui hasil rapot pendidikan Provinsi Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut :





B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada BPMP Provinsi Riau menunjukkan kinerja yang efektif dan akuntabel. Realisasi anggaran mencapai tingkat serapan yang optimal dan sejalan dengan capaian output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui perencanaan yang terarah, pengendalian internal yang konsisten, serta penyesuaian kegiatan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program.

Pagu anggaran BPMP Provinsi Riau dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp.22,651,784,000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp21.051.212.545 dengan persentase daya serap sebesar 92,93%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



Tabel Realisasi anggaran per program Tahun 2025 Unit Kerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
----	---------	-------------------	----------	-----------	---

1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	3.704.962.000	2.044.661.370	55,19
		Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	1.622.557.000	1,656,254,375	99,96
2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik	17,395,646,000	17,304,837,233	99,48
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Riau minimal A	51.640.000	51.640.000	100

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember TA 2025 adalah Rp11.088.383.000,00 dari total alokasi anggaran sebesar Rp11,088,383,000 atau 99,18%

Pada tahun anggaran 2025 ini terdapat beberapa keadaan yang mempengaruhi jumlah realisasi anggaran belanja pegawai, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan gaji PNS tahun 2025 yang diproyeksikan naik dengan kisaran 8% hingga 12% berdasarkan golongan dan masa kerja, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025;
2. Adanya pengangkatan CPNS sebanyak 3 orang pegawai;

3. Adanya pengangkatan PPPK sebanyak 29 orang;
4. Perpindahan pegawai dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional sebanyak 11 orang pegawai;
5. Adanya kenaikan kenaikan jenjang Widyaprada dari ahli muda ke ahli madya sebanyak 5 orang pegawai, dari jenjang Ahli Pertama ke Ahli Muda sebanyak 1 orang;
6. Kenaikan jenjang tunjangan kinerja jabatan pelaksana sebanyak 13 orang;
7. Pegawai yang pensiun berjumlah 3 orang.

Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember TA 2025 adalah Rp10.002.113.359,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp11,511,761,000 atau 86,89%

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi Belanja MODal pada 31 Desember TA 2025 adalah Rp51.640.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 51.640,000 atau 100%

2. Efisiensi Anggaran

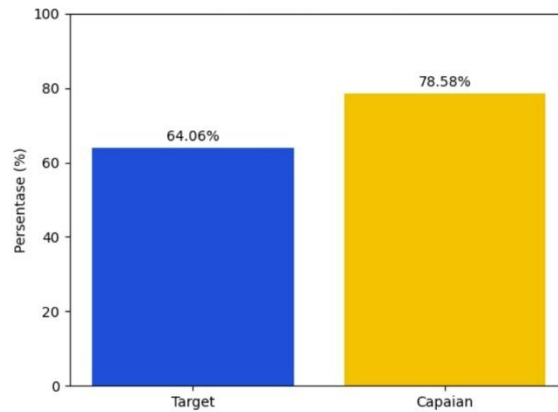
Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja pada satuan kerja.

Pada tahun 2025 BPMP Provinsi Riau telah melakukan efisiensi anggaran sebagai berikut:

IKK. 1.1 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau telah ditetapkan target capaian untuk indikator ini adalah 64,06% . Hingga akhir tahun anggaran capaian yang telah diperoleh adalah sebesar 78,58%. Terdapat kenaikan jumlah capaian sebesar 14,52% dan telah mencapai efisiensi sebesar 122,67%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar

**Diagram Perbandingan Target dan Capaian
Persentase Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan
Hasil Asesmen Nasional Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran**



**Anggaran :
5.204.498.000**

**Realisasi :
3.700.915.745**

**Kenaikan Jumlah Capaian :
14,52%**

**Efisiensi :
22,67%**

Efisiensi IKK. 1.1 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Riau mampu mencapai target kinerja secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Realisasi anggaran Rp21,051,212,545 berada di bawah pagu yang telah ditetapkan Rp22,651,784,000, tanpa mengurangi kualitas keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang direncanakan. Efisiensi tersebut terutama diperoleh melalui optimalisasi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, pengurangan biaya non-prioritas, serta konsolidasi kegiatan yang memiliki kesamaan sasaran.

Meskipun terjadi penghematan anggaran, capaian kinerja tetap berada pada atau di atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Riau berhasil menerapkan prinsip value for money, yaitu mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 BPMP Provinsi Riau menggambarkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil, serta mendukung upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program sesuai arah kebijakan Renstra 2025–2029.

C. Kinerja Lain-lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BPMP Provinsi Riau adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada BPMP Provinsi Riau dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kembali dan internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi
2. Berupaya mempertahankan ZI-WBK yang telah diperoleh
3. Meningkatkan ZI-WBK yang telah diperoleh menjadi ZI-WBBM

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Inovasi

Pada tahun 2025 BPMP Provinsi Riau melakukan inovasi :

1. Bimbingan Teknis Program Prioritas Kemendikdasmen Bagi Pengawas Sekolah se-Provinsi Riau.

Tujuan Program

- a. Meningkatkan kompetensi pengawas sekolah
- b. Memperkuat peran pengawas sebagai pendamping mutu
- c. Meningkatkan profesionalisme dan kolaborasi
- d. Mendukung implementasi program prioritas Pendidikan

Dampak program

Meningkatnya kompetensi serta peran pengawas sekolah dalam pelaksanaan program prioritas menuju pencapaian peningkatan penjaminan mutu pendidikan

2. Pendampingan Penyusunan Laporan Revitalisasi Satuan Pendidikan

Tujuan Program

- a. Meningkatkan pemahaman satpen penerima program revitalisasi dalam penyusunan laporan
- b. Meningkatkan pemahaman satpen dalam penghitungan pajak

Dampak program

Laporan revitalisasi tersusun dengan baik dan tepat waktu

3. Pengembangan Fitur Aplikasi SI-TUAH.

Tujuan Program

- a. Aplikasi utama operasionalisasi perkantoran
- b. Peningkatan pelayanan publik secara realtime dan online

Dampak

- a. Efektifitas dan efisiensi pelayanan
- b. Arsip dan transaksi tersimpan secara baik dan dapat diakses kapanpun secara digital

3. Penghargaan

Pada tahun 2025 BPMP Provinsi Riau mendapatkan penghargaan:

1. Terbaik 2 kategori Produktivitas Barang Milik Negara dari KPKNL ;
2. Terbaik 2 Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PAUD Dasmen
3. Penghargaan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PPID Cukup Informatif di Lingkungan Kemendikdasmen
4. Penghargaan UPT Inisiator Tata Kelola dan Terobosan Advokasi Implementasi Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan
5. Penghargaan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) di Lingkungan Kemendikdasmen





4. Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2025 BPMP Provinsi Riau melakukan program *crosscutting/collaborative* Peningkatan dan Penjaminan mutu pendidikan.

1. Pihak yang melaksanakan *crosscutting/ collaborative* seperti Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Tanoto Foundation Regional Riau, Jambi, dan Sumatera Utara, Pokja Bunda PAUD Provinsi Riau, HIMPAUDI Provinsi Riau, dan Posyandu Provinsi Riau
2. Program *crosscutting/ collaborative* dengan Ombudsman RI Perwakilan Riau dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB). Dengan Tanoto Foundation Riau *crosscutting/ collaborative* dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tata Kelola Pendidikan di Provinsi Riau seperti peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan pembelajaran yang efektif, tata kelola pendidikan yang partisipatif, dan mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data. Sedangkan dengan Pokja Bunda PAUD Provinsi Riau dan HIMPAUDI adalah terkait dengan Wajar 13 tahun, terutama 1 tahun pra sekolah, kualitas layanan PAUD, penguatan peran bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD dalam pendampingan satuan pendidikan, mendorong penguatan tata kelola dan budaya mutu di Satuan PAUD, serta mewujudkan ekosistem PAUD HI dan Inklusif
3. Dampak dari program *crosscutting/collaborative* sangat signifikan terhadap masing-masing program yang diusung seperti dengan Ombudsman permasalahan SPMB tidak terjadi di

Provinsi Riau Tahun 2025. Bahkan meraih penghargaan provinsi yang berhasil dalam SPMB. dengan Tanoto Foundation berhasil meningkatkan mutu pendidikan dan partisipasi aktif penggunaan rapor pendidikan



NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR: 0042/ C7.8/KS.05.00/2025

NOMOR: 48/IX/PokjaBundaPaudRiau/2025

TENTANG

KERJA SAMA ANTARA BPMP PROVINSI RIAU DENGAN POKJA BUNDA PAUD PROVINSI RIAU DALAM RANGKA PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PAUD DI PROVINSI RIAU

Pada hari ini, Senin tanggal Lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Serindit Komplek Kediaman Gubernur Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PIHAK KESATU : Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau

Nama : Dr. Nilam Suri

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Riau

berkedudukan di Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PIHAK KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Provinsi Riau

Nama : Jenny Harveni, S.Psi.

Jabatan : Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Riau

berkedudukan di Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama PARA PIHAK dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) di Provinsi Riau.

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat sinergi antara BPMP Provinsi Riau dan Pokja Bunda PAUD Provinsi Riau dalam:

- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini;
- Menguatkan peran Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD dalam pendampingan satuan PAUD;
- Mendorong penguatan tata kelola dan budaya mutu di satuan PAUD;
- Mewujudkan ekosistem PAUD yang holistik, integratif, dan inklusif.

NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR: 0049/C7.8/KS.05.00/2025

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN DI PROVINSI RIAU

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Januari tahun 2025 (15/01/2025)), bertempat di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PIHAK KESATU : BPMP Provinsi Riau

Nama : Dr. Nilam Suri

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Riau

berkedudukan di Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PIHAK KEDUA : Tanoto Foundation Riau

Nama : Dendi Satria Buana

Jabatan : Regional Lead Tanoto Foundation Riau

berkedudukan di Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama dan sinergi bagi PARA PIHAK dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Provinsi Riau.

Tujuan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan pembelajaran yang efektif.

NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR: 0039/ C7.8/KS.05.00/2025

TENTANG

PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN 2025 UNTUK SELURUH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU

Pada hari ini, Senin tanggal Tigabelas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (13/01/2025), bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PIHAK KESATU : BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI RIAU

Nama : Dr. Nilam Suri

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Riau

berkedudukan di Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PIHAK KEDUA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Nama : Bambang Pratama, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau

berkedudukan di Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama antara BPMP Provinsi Riau dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas BPMP Provinsi Riau atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan BPMP Provinsi Riau dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Melalui evaluasi ini, BPMP Provinsi Riau berkomitmen untuk memperkuat langkah peningkatan kinerja di tahun berikutnya, termasuk penguatan tata kelola, efektivitas program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja semakin selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Selama tahun 2025, BPMP Provinsi Riau berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. SDM UPT belum sepenuhnya paham berkenaan dengan SNP dan siklus SPMI karena beberapa tahun lalu fokus dengan IRBB berdasarkan Rapor Pendidikan
2. Satuan pendidikan lebih akrab dengan IRB dibanding dengan SPMI.
3. Banyak sekolah mengalami kekurangan jumlah komputer atau laptop untuk menampung seluruh peserta ujian sesuai sesi yang dijadwalkan. Selain itu, ditemukan perangkat yang mengalami kerusakan fisik seperti *keyboard* tidak berfungsi, komputer *hang*, hingga laptop yang mati mendadak karena kehabisan daya pada pelaksanaan TKA
4. Ketidakstabilan koneksi internet dan penurunan performa (*down*) pada server pusat, terutama pada sesi tertentu. Hal ini menyebabkan gangguan sistem seperti otomatis *logout* berulang kali, aplikasi tertutup tiba-tiba (*force close*), layar membeku, hingga munculnya pesan *Error 404*;
5. Meskipun koordinasi dengan PLN telah dilakukan, pada beberapa sekolah yang di monev masih ditemukan insiden pemadaman listrik yang menghambat jalannya pelaksanaan TKA

Langkah ke depan dalam Peningkatan Kinerja tahun berikutnya

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, BPMP Provinsi Riau telah menetapkan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Upaya peningkatan tersebut difokuskan pada penguatan perencanaan, optimalisasi proses bisnis, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

1. BPMP Provinsi Riau memperkuat perencanaan kinerja melalui penyelarasan yang lebih ketat antara sasaran, indikator, dan alokasi sumber daya, sehingga target kinerja dapat dicapai secara

lebih terukur.

2. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelaksanaan program akan dilakukan melalui integrasi teknologi informasi, standardisasi prosedur kerja, serta pengendalian internal yang lebih sistematis.
3. BPMP Provinsi Riau meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan mekanisme monitoring kinerja yang lebih adaptif. Peningkatan kapasitas SDM UPT dengan mengundang narasumber dari tim PMP Pusat
4. Memperluas koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan dukungan lintas fungsi dalam pencapaian sasaran strategis. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong peningkatan kualitas layanan pada tahun mendatang.
5. Diseminasi hasil kegiatan PMP di pusat ke tim walwil
6. Advokasi SNP dan siklus SPMI
7. Untuk kekurangan perangkat sekolah mengambil langkah praktis dengan meminjam laptop milik guru dan siswa secara kolektif untuk menutupi kekurangan unit. Bagi sekolah yang belum memiliki sarana memadai, diarahkan untuk menumpang di sekolah terdekat atau lembaga pendidikan lain;
8. Untuk menangani ketidak stabilan internet proktor dan teknisi melakukan tindakan responsif seperti *reset login*, *restart* aplikasi, atau penggunaan token baru agar siswa dapat segera melanjutkan ujian setelah gangguan sistem. Komunikasi cepat dilakukan melalui grup WhatsApp dan *helpdesk* Dinas Pendidikan untuk koordinasi kendala operasional;
9. Untuk permasalahan kelistrikan, sebelumnya sekolah diinstruksikan untuk menyediakan sumber daya cadangan seperti genset atau UPS.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Revisi
3. Tabel pengukuran kinerja
4. Lembar reuiu LAKIN mandiri

1. PK Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**


Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nilam Suri
Jabatan : Kepala
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Pekanbaru, 1 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Nilam Suri

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06
	[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Riau minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp9.693.421.000
2	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp16.846.693.000
Total Anggaran			Rp26.540.114.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Anak
 Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
 Pendidikan Menengah
 Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Pekanbaru, 1 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala
 Dr. Nilam Suri

2. PK Revisi



Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala BPMP Provinsi Riau
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah


Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nilam Suri
Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Riau
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Pekanbaru, 12 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPMP Provinsi Riau
Dr. Nilam Suri

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06
	[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Riau dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Riau minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp5.204.498.000
2	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp17.447.286.000
Total Anggaran			Rp22.651.784.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Anak
 Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
 Pendidikan Menengah
 Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Pekanbaru, 12 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala BPMP Provinsi Riau
 Dr. Nilam Suri

4. Lembar Reviu Lakin Mandiri

Pernyataan		Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah Direviu
BPMP Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 29 Januari 2026

Ketua Tim Reviu,



Lelik Hidayati, S.Sos, MM